



Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali

Putu Yusi Pramandari^{1,*}, David Kaluge²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bawijaya

Informasi Artikel

Sejarah artikel:
Diterima Februari 2017
Disetujui Maret 2017
Dipublikasikan Maret 2017

Keywords:
Decentralization,
Growth,
PAD,
inequality

ABSTRACT

Economic growth is one of the goals of national development. The decentralization policy implemented Indonesia currently provides opportunity for each region to develop the potential of the area, so that each region is able to achieve an economic growth rate that make welfare for community analysis used in this paper is a multiple linear regression with panel data (pooling data) 9 (nine) districts in Bali Province 2009-2015. Year period of data analysis showed that Pendapatan Asli Daerah and Dana Perimbangan affect the economic growth of the district in the province of Bali. Pedapatan Asli Daerah (PAD) and a real positive influence on economic growth district in Bali Province, Dana Perimbangan partially negatively affect economic growth in the district in the province of Bali during the period from 2009 - 2015 increased economic growth in an era of fiscal decentralization have not fully followed by the distribution of economic growth districts in Bali Province. This is evidenced by the Williamson index value stood at 0,687, which means there is still inequality regional GDP per capita among districts in Bali Province. Still there is an imbalance between districts shows that the achievement of development objectives are not yet capable of prospering society.

© 2017 MediaTrend

Penulis korespondensi:
E-mail: yusipramandari@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.21107/mediatrend.v12i1.2633>
2460-7649 © 2016 MediaTrend. All rights reserved.

Pendahuluan

Pengeluaran pemerintah yang tidak berlebihan dan memikirkan subsidi antara pusat dan daerah dengan tujuan yang baik memiliki hubungan yang positif dan kuat terhadap pertumbuhan (Yushkov, 2015). Dilain sisi Thornton (2006) menyatakan bahwa hasil penelitiannya pada 19 negara anggota OEDC menunjukkan hasil yang berbeda dimana ketika ukuran dari desentralisasi fiskal yang terbatas dari kelebihan pendapatan yang pemerintah daerah miliki pada otonomi penuh memiliki dampak yang tidak signifikan secara statistik pada pertumbuhan.

Desentralisasi fiskal dapat dilakukan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan yang mana dengan pemanfaatan yang baik di era otonomi daerah. Meskipun desentralisasi fiskal tidak dengan cepat dapat mempengaruhi disparitas pembangunan regional untuk lebih merata (Song, 2013). Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal bukanlah konsep baru di Indonesia. Hal tersebut sudah diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1975 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Otonomi daerah berjalan dengan berlandaskan pada Undang Undang No. 22 tahun 1999 dan Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Desentralisasi fiskal baru dijalankan pada 1 Januari 2001 berdasarkan Undang Undang No. 25 tahun 1999 yang disempurnakan dengan Undang Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Prinsip dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ialah "*Money Follows Functions*", yaitu fungsi pokok pelayanan publik didaerahkan, dengan dukungan pembiayaan pusat melalui penyerahan sumber-sumber penerimaan kepada daerah (Waluyo, 2007:2).

Salah satu tujuan kebijakan desentralisasi adalah untuk menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyat, sehingga pelayanan pemerintah dapat dilaku-

kan dengan efektif dan efisien (Khusaini, 2006). Hal ini berdasarkan asumsi bahwa pemerintah kabupaten dan kota memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat daerahnya dibandingkan pemerintah pusat. Kabupaten dan kota merupakan daerah ujung tombak pelaksanaan pembangunan dan diharapkan mampu menggali potensi daerah yang pada akhirnya mampu meningkatkan *local accountability* pemerintah daerah terhadap rakyatnya.

Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah peningkatan PDRB yang mampu menunjukkan keberhasilan pembangunan daerah. Sejalan dengan pencapaian tujuan tersebut, maka pertumbuhan yang diharapkan adalah pertumbuhan yang mampu ditunjang oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan PDRB yang disertai pemerataan. Pertumbuhan yang seperti ini menunjukkan bahwa pertumbuhan daerah telah mampu ditunjang oleh kualitas kemampuan pembiayaan daerah. Pelaksanaan pembangunan ekonomi pada masing – masing kabupaten/kota telah menghasilkan pencapaian yang berbeda – beda. Hal ini berhubungan dengan keunggulan yang dimiliki oleh masing – masing kabupaten/kota serta potensi ekonomi yang dimilikinya. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa proses pembangunan baik di Provinsi Bali maupun di wilayah lainnya telah menghasilkan perbedaan – perbedaan antar satu wilayah dengan wilayah lainnya.

Landasan Teori

Desentralisasi fiskal merupakan varian dari pelaksanaan desentralisasi yang ditempuh suatu negara. Desentralisasi fiskal ini dapat didefinisikan sebagai devolusi (penyerahan) tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat kepada tingkatan pemerintahan yang ada dibawahnya, *sub-national levels of government*, seperti negara bagian, daerah,

propinsi, distrik, dan kota (Lutfi, 2002). Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyaknya jenis barang dan jasa kepada penduduknya (Kuznet dalam Jhingan, 1999). Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan, dan ideologi yang diperlukan. Todaro (2000) mengatakan bahwa ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi. Akumulasi modal meliputi semua bentuk investasi yang ditanamkan baik pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia. Model pertumbuhan ekonomi Solow menunjukkan bagaimana tabungan, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi mempengaruhi tingkat output perekonomian serta pertumbuhannya sepanjang waktu (Menkiw, 2003). Kenaikan tingkat tabungan yang tinggi akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam jangka pendek, tetapi perekonomian akan mendekati kondisi mapan dimana modal dan output adalah konstan. Tingkat modal yang memaksimalkan konsumsi pada kondisi mapan disebut tingkat kaidah emas.

Pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan sebagai hasil pendapatan daerah dilihat dari *output*nya. Secara teori produksi, apabila penerimaan daerah berupa sumber-sumber dana pembangunan (PAD dan dana perimbangan) merupakan input pembangunan maka *output* dari proses tersebut adalah pertumbuhan ekonomi. Lembaga yang mengkoordinasikan transformasi berbagai *input* untuk menghasilkan *output* tersebut disebut perusahaan (Nicholson, 2001). Berdasarkan hal tersebut, dalam proses pertumbuhan ini pemerintah adalah perusahaan yang mengelola, mengalokasikan, dan mengeluarkan kebijakan berkaitan proses tersebut. Teori produksi menyebutkan bahwa

terdapat hubungan yang positif antara faktor produksi dan *output* yang dalam penelitian ini adalah sumber-sumber dana pembangunan (PAD dan dana perimbangan) dan pertumbuhan ekonomi.

Davoodi dan Zou (1998) meneliti tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap 46 negara berkembang dan sedang berkembang. Peneliti menggunakan model pertumbuhan endogen yang menunjukkan bagaimana tingkat dari desentralisasi fiskal memiliki efek pada tingkat pertumbuhan ekonomi. Pada hasil penelitian ini, rata-rata negara berkembang lebih mandiri dibandingkan negara sedang berkembang serta memiliki GDP perkapita dengan pertumbuhan yang lebih tinggi.

Kneller, dkk (1999) meneliti tentang pengaruh kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi pada 22 negara anggota organisasi kerjasama ekonomi dan pembangunan (OECD) periode tahun 1970-1995, dengan melakukan analisis *random effect model*. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penerimaan pajak pendapatan dan keuntungan, pajak keamanan sosial, pajak upah tenaga kerja, dan pajak kekayaan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan penerimaan pajak atas barang dan pelayanan domestik berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah yang bersifat produktif berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, pengeluaran pemerintah yang non produktif berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Metode Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi dengan indikator laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tahun dasar 2000 menurut 9 (sembilan) kabupaten/ kota di Provinsi Bali selama Tahun 2009-2015. Laju pertumbuhan ekonomi adalah variabel terikat (Y) sedangkan PAD (X1) dan Dana Perim-

bangun (X_2) adalah variabel bebas. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Biro Keuangan Provinsi Bali, dan dinas lain yang terkait. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam adalah dengan menggunakan metode observasi non perilaku. Metode observasi non perilaku adalah metode pengumpulan data yang diambil dari dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara membaca, menyalin dan mengolah dokumen dan catatan tertulis yang ada.

Analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah regresi linier berganda dengan data panel (*pooling data*) 9 (sembilan) kabupaten/ kota di Provinsi Bali periode tahun 2009-2015. Untuk mengetahui model panel yang digunakan, terlebih dahulu digunakan Uji *Restricted F-test* serta *Uji Random* dan *Fixed Effect*. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota di Provinsi Bali periode tahun 2009-2015. Persamaan regresinya sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{Ln } X_1 + \beta_2 \text{Ln } X_2 + \mu_i$$

Keterangan : Y= Laju pertumbuhan ekonomi 9 (sembilan) kabupaten/kota di Provinsi Bali periode tahun 2009 – 2015; $\text{Ln}X_1$ = Pendapatan Asli Daerah (PAD) 9 (sembilan) kabupaten/kota di Provinsi Bali periode tahun 2009-2015; $\text{Ln}X_2$ = Dana perimbangan 9 (sembilan) kabupaten/ kota di Provinsi Bali periode tahun 2003; α = Intersep yang menggambarkan rata-rata pengaruh dari berbagai variabel/faktor yang mempengaruhi Y akan tetapi tidak

dimasukan dalam persamaan regresi; β_1 dan β_2 = Koefisien regresi parsial; μ_i = Tingkat kesalahan (gangguan) stokastik.

Hasil dan Pembahasan

Restricted F-test

Untuk mengetahui model *Pooled Least Square* (PLS) atau *Fixed Effect Model* (FEM) yang akan dipilih untuk estimasi data dapat dilakukan dengan uji *F-test*. PLS adalah *restricted model* dimana ia menerapkan *intercept* yang sama untuk seluruh individu. Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa $F_{hitung} = 6,58195 > F_{(0,05)(4)(51)} = 2,53$. Ini berarti bahwa model yang diolah dengan *Fixed Effect (Unrestricted)* lebih baik dibandingkan dengan model yang diolah dengan Model *Pooled Least Square (Restricted)*.

Uji Random dan Fixed Effect

Setelah diketahui bahwa *unrestricted* model lebih baik digunakan dibandingkan dengan *restricted* model, maka selanjutnya untuk melihat apakah *unrestricted* model mengikuti *random effect* atau *fixed effect* dengan Hausman test (Sanjoyo, 2007). Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan *Eviews 6.0* diperoleh bahwa $p\text{-value} = 0,0000 < \alpha = 0,05$. Ini berarti model *Fixed effect* lebih baik digunakan untuk melakukan analisis data panel dibandingkan dengan model *Random effect*.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik melewati tiga tahap pengujian yang harus dilakukan terhadap variable untuk menghindari multikolinearitas, autokorelasi

Tabel 1
Hasil Perhitungan VIF dan TOL Variabel Bebas

Variabel bebas	VIF	TOL
Log(Dana Perimbangan)	1,018	0,982
LOG(PAD)	1,026	0,975
Laju Pertumbuhan Penduduk	1,018	0,982

Sumber : Hasil perhitungan

dan heteroskedastisitas seperti berikut.

$$Y = 8,185 + 0,201 \text{ Ln}X_1 - 0,427 \text{ Ln}X_2$$

Uji Multikolinearitas

Setelah melakukan pengujian melalui program *Eviews* 6.0, diperoleh nilai VIF sebesar 1,018 dan 1,026 nilai TOL sebesar 0,982 dan 0,975. Ini berarti dalam model regresi tidak terjadi multikolinearitas, karena multikolinearitas terjadi apabila nilai VIF lebih besar dari 10 dan TOL lebih kecil dari 0,10.

Uji Autokorelasi

Autokorelasi dapat dilihat pada hasil *Model Fixed Effect White Heteroscedasticity Consistence Variance* dengan bantuan program *Eviews* 6.0 dimana didalamnya terdapat nilai yang menjadi tolak ukur autokorelasi yaitu nilai uji Durbin Watson. Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa $du = 1,70 < d\text{-hitung} = 2,033153 < 4\text{-}du = 2,30$. Ini berarti $d\text{-hitung}$ berada pada daerah bebas autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Karena estimasi model hasilnya harus menggunakan *fixed effect* maka perlu dilakukan uji LM (*Lagrang Multiplier*) untuk pemilihan estimator struktur heterokedastik dan homokedastik. Dari hasil pengolahan data diperoleh bahwa $LM\text{-test} = 30,50945 > \chi_{(8;0,05)} = 15,5073$, sehingga dapat disimpulkan adanya heteroskedastik pada model. Untuk menghilangkan gejala heteroskedastisitas tersebut, estimasi model *fixed effect* yang akan digunakan adalah dengan *Model Fixed Effect White Heteroscedasticity Consistence Variance* yang sudah tersedia di dalam program *Eviews Student Lite* 9.5 (Nachrowi dan Usman, 2006).

Hasil Persamaan Regresi

Penelitian menggunakan program *Eviews Student Lite* 9.5. Hasil pengolahan data dengan model *fixed effect* menghasilkan persamaan sebagai berikut:

Uji Serempak

Pengujian secara simultan atau menyeluruh bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang linier antara variabel terikat yaitu laju pertumbuhan ekonomi (Y) dengan variabel bebas yaitu PAD (X_1) dan dana perimbangan (X_2). Hasil uji serempak diperoleh nilai $F_{hitung} (7,792) > F_{table} (2,76)$ maka H_0 ditolak. Ini berarti bahwa PAD dan dana perimbangan secara serempak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali dalam era desentralisasi fiskal. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya, khususnya penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni yang juga menyimpulkan bahwa sumber-sumber dana pembangunan secara serempak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali.

Uji Parsial

Dalam Uji Parsial, maka diperoleh beberapa hal, yaitu: (a) Pengaruh PAD (X_1) terhadap laju pertumbuhan ekonomi 9 (sembilan) kabupaten/kota di Provinsi Bali (Y): Oleh karena $t_{hitung} (4,558) > t_{table} (1,671)$ maka H_0 ditolak. Ini berarti bahwa PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali dalam era desentralisasi fiskal. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni yang menyimpulkan bahwa pajak dan retribusi daerah (yang merupakan komponen utama PAD) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Semakin besar PAD yang mampu dihasilkan oleh kabupaten/kota maka semakin besar sumber pendanaan pembelanjaan daerah yang dimiliki. Meningkatnya PAD berarti meningkatnya modal pembangunan dan sekaligus membuktikan semakin tingginya tingkat kemandirian daerah dalam menggali potensi

daerah demi mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan yang memberikan kontribusi utama dalam PAD; (b) Pengaruh dana perimbangan (X_2) terhadap laju pertumbuhan ekonomi 9 (sembilan) kabupaten/kota di Provinsi Bali (Y): Oleh karena $t_{hitung} (-1,929) > t_{table} (-1,671)$ maka H_0 ditolak. Hal ini berarti bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota di Provinsi Bali. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Sri Wahyuni yang menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Adanya hubungan yang negatif antara dana perimbangan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota ini menunjukkan bahwa seiring dengan era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal saat ini, meningkatnya kemampuan daerah dalam menghimpun dana pembangunan melalui dana perimbangan belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal ini dikarenakan alokasi dana perimbangan tidak sepenuhnya terfokus pada peningkatan produktifitas laju

seperti pemberian intensif bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM), sektor pertanian atau agribisnis yang mampu memberikan devisa bagi daerah, sektor industri dan perdagangan serta sektor ekonomi lainnya yang sesuai dengan potensi daerahnya.

Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali dalam Era Desentralisasi Fiskal

Disparitas atau ketimpangan regional dapat dilihat melalui indikator PDRB per kapita. Alasan utamanya karena PBRB per kapita merupakan indikator kesejahteraan suatu masyarakat. Terjadinya disparitas selalu mengikuti arah pembangunan, apabila dikaitkan dengan hipotesis Kuznets dimana saat titik awal pembangunan disparitas akan semakin tinggi hingga pada kurun waktu tertentu akan mengalami penurunan yang menyerupai titik U terbalik (Tumbunan, 2001 : 73). Ilustrasi tersebut menyiratkan bahwa jika pertumbuhan ekonomi tinggi akan menyebabkan terjadinya gejala disparitas pendapatan antar daerah. Fenomena tersebut terjadi karena daerah kaya akan terus mengalami peningkatan pendapatan, sedangkan daerah miskin akan mengalami keterbelakangan.

Tabel 2
Efek Individu dengan Model Fixed Effect White Heteroscedasticity Consistence Variance

No.	Kabupaten/ Kota	Nilai Intersep per Kabupaten/ Kota
1	Buleleng	7,324035
2	Jembrana	7,482926
3	Tabanan	7,418816
4	Badung	7,677474
5	Gianyar	8,279243
6	Bangli	8,653260
7	Klungkung	8,724212
8	Karangasem	8,824991
9	Denpasar	9,282373

pe
un
ta:

Sumber : Hasil Perhitungan

an
n-
ih.

Heterogenitas antar daerah yang dihasilkan mencerminkan adanya faktor-faktor/ variabel lain yang dimiliki satu daerah tetapi tidak dimiliki oleh daerah lain. Dengan kata lain, suatu daerah yang memiliki keunggulan dalam variabel lain (diluar variabel bebas dalam model). Apabila diasumsikan variabel bebas tidak berubah, maka determinan dari pertumbuhan ekonomi suatu daerah hanya akan tergantung dari efek individu (heterogenitas antar daerah).

Hasil estimasi menunjukkan bahwa Kota Denpasar mempunyai nilai intersep yang paling tinggi, relatif terhadap daerah lain (Tabel 3). Artinya adalah bahwa heterogenitas antara Kota Denpasar dengan daerah-daerah lain dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Salah satu variabel yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar relatif lebih baik (*ceteris*

kan yang lebih modern dan mempunyai pengalaman dalam mengikuti pelatihan-pelatihan dalam bidang pekerjaannya, sehingga mampu meningkatkan kualitas kemampuan tenaga kerja. Menurut Wicken (*undated*), kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi tidak akan sebesar kontribusi perbaikan kualitas tenaga kerja. Pengembangan dalam kualitas angkatan kerja dapat diciptakan melalui tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan mungkin lebih penting adalah melalui pelatihan-pelatihan pekerjaan. Intensitas pekerjaan yang dapat dilakukan per jam oleh tenaga kerja menjadi kurang penting dibandingkan dengan peningkatan kualitas tenaga kerja. Analisis ini sangat kuat mendukung pendapat umum tentang pentingnya pendidikan dan pelatihan modern saat ini. Hal yang tidak kalah penting adalah adanya kesinambungan dalam proses pendidikan dan training untuk peningkatan

Tabel 3
Nilai Indeks Williamson Antar Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali Tahun 2001-2015

Tahun	IW
2001	0.484
2002	0.484
2003	0.483
2004	0.485
2005	0.478
2006	0.467
2007	0.456
2008	0.456
2009	0.463
2010	0.457
2011	0.532
2012	0.574
2013	0.553
2014	0.585
2015	0.687

Sumber : Hasil Perhitungan

paribus, variabel bebas = 0) dibandingkan dengan daerah lain adalah tenaga kerja yang mempunyai latar belakang pendid-

ikualitas tenaga kerja (Farid, 2007).

Ketimpangan dalam penyediaan infrastruktur antar kabupaten/kota di

Provinsi Bali juga merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perbendaan dalam pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah. Kota Denpasar yang merupakan ibukota dari Provinsi Bali tentunya memiliki infrastruktur yang lebih banyak dan jauh lebih memadai dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya di Provinsi Bali. Selain pentingnya ketersediaan infrastruktur fisik, ketersediaan *soft infrastructure* juga sama pentingnya. Era otonomi seperti sekarang ini, menyebabkan setiap daerah mempunyai otonomi pada bidang-bidang tertentu, sehingga dimungkinkan kebijakan pemerintah daerah akan berbeda. Padahal dalam kaitannya dengan investasi, kepastian hukum merupakan pertimbangan utama bagi para investor. Hal ini lah yang menyebabkan juga terjadinya disparitas perekonomian di daerah saat ini (Farid, 2007).

Pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu tujuan dari Trilogi Pembangunan. Adanya pembangunan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga diikuti dengan tingkat pemerataan merupakan suatu cermin kesejahteraan masyarakat. Berikut ini disajikan mengenai nilai indeks Williamson per kabupaten/kota di Provinsi Bali selama era desentralisasi fiskal.

Tabel 3 menunjukkan bahwa sampai tahun 2015 nilai indeks Williamson atau ketimpangan pendapatan antar kabupaten kota di Provinsi Bali adalah sebesar 0,687. Nilai dari koefisien Williamson ini adalah terletak antara 0 sampai dengan 1, dimana semakin mendekati 0 berarti disparitas pendapatan semakin ringan, dan semakin mendekati 1 disparitas pendapatan adalah semakin berat. Dari kriteria tersebut, maka dapat dikatakan bahwa disparitas pendapatan dengan menggunakan PDRB per kapita antar kabupaten/kota di Provinsi Bali relatif stabil pada periode desentralisasi fiskal ini. Walaupun demikian keadaan tersebut belum menunjukkan adanya pemerataan pembangunan antar kabupaten/kota di

Provinsi Bali. Hal ini berarti bahwa desentralisasi fiskal belum mampu menciptakan pemerataan pendapatan antar kabupaten/kota di provinsi Bali. Beberapa faktor yang mungkin menjadi alasan ketimpangan ini diantaranya perbedaan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki oleh kabupaten/kota serta perbedaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memicu kualitas SDM yang mampu meningkatkan pembangunan kabupaten/kota serta infrastruktur yang tersedia.

SDA yang dimiliki oleh Provinsi Bali memang tidak semelimpah provinsi lain seperti Aceh dengan gas alamnya ataupun Irian Jaya dengan tembaganya. Provinsi Bali bergantung pada SDA yang mendukung sektor wisata yang menjadi sumber PAD tertinggi provinsi ini. Akan tetapi tidak semua kabupaten/kota memiliki sumber SDA yang sama yang mampu menarik minat wisatawan ataupun investor untuk berinvestasi. Hal ini yang menyebabkan hanya Kabupaten Badung yang memiliki PAD tertinggi setelah desentralisasi yang kemudian diikuti oleh Kota Denpasar.

Kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan menjadi lahan pekerjaan utama yang dilirik oleh penduduk Bali. Hal ini yang menjadikan pembangunan di Kota Denpasar lebih pesat dibandingkan kabupaten lainnya. Keadaannya sama seperti ibukota Jakarta. Sebagai pusat pemerintahan provinsi, Kota Denpasar menarik para pencari kerja dan menjadikannya sebagai sumber SDM berkualitas.

Faktor-faktor inilah yang seharusnya menjadi pusat perhatian pemerintah daerah dalam pengelolaan daerahnya, sehingga tujuan dari otonomi dan desentralisasi fiskal mampu menjadikan daerah lebih mandiri yang berarti daerah diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonominya secara merata. Bagaimana setiap kabupaten/kota mampu memanfaatkan SDA maupun SDM yang dimilikinya sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerahnya. Perbaikan pendapatan

daerah akan berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita yang berarti peningkatan daya beli masyarakat yang berujung pada peningkatan kesejahteraan. Dengan tercapainya kesejahteraan ini barulah dapat dikatakan tercapainya tujuan dari pembangunan nasional.

Penutup

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil simpulan sebagai berikut: (a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan secara serempak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali; (b) Secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali, sedangkan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali; (c) Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dalam era desentralisasi fiskal belum mampu diikuti oleh pemerataan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal ini terbukti dengan nilai indeks Williamson yang berada pada angka 0,645, yang berarti masih adanya ketimpangan PDRB per kapita antar kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan simpulan yang telah disampaikan adalah sebagai berikut: (a) Pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali sekiranya dapat mempertimbangkan secara mendalam peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan laju pertumbuhan penduduk sebagai modal pembangunan dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi melalui reorientasi penggunaan sumber pendanaan pembangunan dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk; (b) Upaya-upaya peningkatan penerimaan daerah sebagai sumber dana pembangunan harus semakin ditingkatkan demi tercapainya kemandirian daerah sesuai dengan tujuan

desentralisasi. Peningkatan penerimaan daerah khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan dengan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah; (c) Dana perimbangan sebagai salah satu sumber dana pembangunan daerah hendaknya dapat dialokasikan untuk membantu pendanaan daerah. Reorientasi dana perimbangan diperlukan dalam melaksanakan fungsinya menyediakan pelayanan publik yang nantinya diharapkan dapat menjadi intensif daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi; (d) Pertumbuhan yang tinggi di Provinsi Bali harus mampu menciptakan pemerataan pertumbuhan bagi kabupaten/kota, untuk itu pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan upaya perbesaran anggaran pembangunan serta memberikan prioritas kebutuhan bagi daerah dengan PDRB rendah; (d) Pengembangan investasi fisik hendaknya diarahkan pada kabupaten dengan infrastruktur yang lebih rendah, sehingga investasi tidak hanya terpusat pada Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, selain itu alokasi investasi harus dilihat berdasarkan potensi daerah yang belum diupayakan sehingga mampu memberikan nilai tambah yang baru terhadap pembentukan PDRB daerah yang berujung pada peningkatan PDRB per kapita.

Daftar Pustaka

- _____.2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2015. *Bali Membangun 2009 - 2015*
- Bendesa, IKG. 2007. *Hand Out Mata Kuliah Ekonometrika Program Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. Denpasar.

- Departemen Dalam Negeri RI.2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.
- Farid, Miftah. 2007. *Pengaruh Disparitas Antar Daerah dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Menggunakan Data Panel Propinsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Depok.
- Gujarati, Damodar. (Sumarno Zain; pen-terjemah).1997. *Ekonometrika Dasar Cetakan Pertama*, Erlangga. Jakarta.
- Davoodi, Hamid dan Henmg-Fu Zou. 2000. Fiscal Decentralization And Economic Growth: A Cross-Country Study. *Journal Of Urban Economics* 43:244.
- Indrastuti, Dewi. 2004. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat, 1983 – 2002, *Tesis*. Uni-versitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Irawan, dan M Suparmoko. 2002. *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Keenam. BPFE. Yogyakarta.
- Indrawati, Yulia. 2007. *Panel Data Regres-sion Model*. Jakarta.
- Jhingan, M.L.1999. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kneller, Richard, Michael F. Blaney and Norman Gemmel. 1999. Fiscal Policy and Growth : Evidence from OECD Countries, *Journal of Public Econom-ics*. 74:171-190.
- Kuncoro, M. 2003. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Edisi Ketiga. UPP-AMP-YKPN. Yogyakarta.
- Khusaini, Muhamad, 2006. *Ekonomi Publik : Desentralisasi Fiskal dan Pembangu-nan Daerah*, BPFE Unbraw, Malang
- Lutfi, Achmad. 2002. Pemanfaatan Kebijakan Desentralisasi Fiskal Berdasarkan UU No. 34/2000 oleh Pemda Untuk Menarik Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : Suatu Studi Di Kota Bogor. <http://publik.brawijaya.ac.id/simple/us/jurnal/pdf/4empirik-lutfi-DESEN-TRALISASI%20FISKAL.pdf>. Menkiew, N.Gregory. 2003. Teori Makro Ekonomi. Edisi Kelima. Jakarta : Erlangga.
- Nachrowi, D Nachrowi dan Hardius Usman. 2006. *Pendekatan Populer dan Praktis: Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Nicholson, Water. 2001. *Teori Ekonomi Mikro, Prinsip Dasar dan Pengembangannya*. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Republik Indonesia. 2004. Undang – un-dang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- . 2004. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan daerah
- Sanjoyo. 2007. Analisis Data Panel. Situs resmi: <http://sanjoyo55.wordpress.com>
- . 2007. Struktur Model II (Fixed & Random Effect). Situs resmi: <http://sanjoyo55.wordpress.com>
- .2007. Model III- Heterogenity Co-efisient. Situs resmi: <http://sanjoyo55.wordpress.com>
- Sri Wahyuni, Ni Ketut. 2008. Pengaruh Sumber – Sumber Dana Pembangu-nan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Dalama Era Desentralisasi Fis-kal. Tesis Program Magister Ekonomi Pembangunan pada Program Pasca Sarjana FE UNUD, Denpasar.
- Wang Yong.2013. Fiscal Decentralization, Endogeneous Policy and Foreign Direct Investment Theory and Evidence from China and India. *Journal of Develop-ment Economics* 103 (2013)
- Yushkov, Andrew. 2015. Fiscal Decentraliza-tion and Regional Economics Growth:

Theory, Empirics, and The Russian Experience. Russian Journal of Economics I (2005).